

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

TAHUN ANGGARAN 2020



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
DINAS KETAHANAN PANGAN

Jln. J. F. Puttileihalat – P I R U

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemenuhan kebutuhan pangan merupakan hak azasi setiap manusia untuk hidup dan beraktifitas, dengan demikian pangan sangat mempengaruhi stabilitas Nasional, stabilitas nasional dapat terguncang jika ketersediaan pangan tidak terjamin. Secara umum Ketahanan Pangan dapat dikatakan terwujud apabila tersedianya pangan yang cukup dan merata untuk seluruh penduduk, kemudian setiap penduduk mempunyai akses fisik dan ekonomi terhadap pangan untuk memenuhi gizi guna menjalani kehidupan yang sehat dan produktif dari hari ke hari.

Ketahanan Pangan pada tingkat rumah tangga merupakan landasan bagi Ketahanan Pangan masyarakat, yang selanjutnya menjadi pilar bagi ketahanan pangan daerah dan nasional. Berdasarkan pemahaman tersebut, maka salah satu prioritas utama pembangunan ketahanan pangan adalah memberdayakan masyarakat, agar mampu menanggulangi masalah pangannya secara mandiri, serta mewujudkan ketahanan pangan rumah tangganya secara berkelanjutan. Menurut Undang-Undang No 18 Tahun 2012 Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Salah satu upaya Pemerintah untuk mewujudkan Ketahanan Pangan dilaksanakan melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan, yang menyatakan bahwa penyediaan pangan diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi pangan rumah tangga yang terus berkembang dari waktu ke waktu melalui :

- a) Pengembangan sistem produksi pangan yang bertumpu pada sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal;
- b) Pengembangan efisiensi sistem usaha pangan;
- c) Pengembangan teknologi produksi pangan;
- d) Pengembangan sarana dan prasarana produksi pangan; dan
- e) mempertahankan dan mengembangkan lahan produktif.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan akan dilaksanakan oleh satuan kerja/organisasi melalui kegiatan tahunan. Hal ini sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan organisasi.

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dilakukan seiring dengan agenda penyusunan program dan kebijakan anggaran oleh pimpinan satuan organisasi/kerja (SKPD) yang akan dicapai dalam tahun berjalan.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 5587);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 tahun 2020, tentang Pedoman Penyusunan Renjana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 590);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangkah Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 04 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat;
11. Peraturan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat;
12. Peraturan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020.

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Ketahanan Pangan) Kabupaten Seram Bagian Barat adalah dalam rangka menyusun rencana teknis kegiatan tahunan yang menjadi acuan pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja yang diemban oleh seluruh aparatur, yang dilaksanakan secara koordinatif dan terpadu dengan instansi terkait, lembaga swadaya masyarakat, kalangan dunia usaha, dan masyarakat, agar terwujud keberhasilan pelaksanaannya secara sinergi yang akan dibiayai oleh Dana APBD Kabupaten, APBD Propinsi, dan APBN.
2. Tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini adalah:
 - a. Menetapkan program dan kegiatan sebagai Rencana Aksi (*Action Plan*) dalam rangka mencapai Visi, Misi, tujuan dan Sasaran yang akan dicapai dalam Rencana Strategis (Renstra);
 - b. Mengakomodir masalah-masalah prioritas dalam pelaksanaan pembangunan ketahanan pangan Kabupaten Seram Bagian Barat yang perlu diselesaikan, terutama yang mengarah pada pemulihan atau perbaikan, peningkatan pelayanan dan pembinaan terhadap masyarakat dalam hal peningkatan kinerja pada aspek ketersediaan, distribusi, serta konsumsi dan kemanana pangan.

- c. Mengidentifikasi sumber pembiayaan dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan;
- d. Untuk memberikan pedoman bagi aparatur dan unit kerja di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Seram Bagian Barat dalam melaksanakan pelayanan administrasi sebagai fungsi utamanya, dalam rangka meningkatkan kinerja aparatur Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Seram Bagian Barat ;

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan Rencana Kinerja (RKT) ini adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RNJA OPD TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2017 dan capaian Renstra OPD
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Renja OPD
- 5.1. Program dan Kegiatan

BAB IV. PENUTUP

BAB I

RENCANA STRATEGI

2.1. Pencapaian Kinerja Tahun 2020

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 29 tahun 2010 Bab III mengenai pengukuran kinerja di dalam pasal 10 ayat (1) menyatakan bahwa setiap akhir periode instansi melakukan pengukuran pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja. Tingkat pencapaian sasaran merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan, sebagaimana telah dituangkan dalam penetapan kinerja, dimana tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran indikator kinerja sasaran.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2020 dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja sasaran dengan realisasinya. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator sasaran tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel.2.1. Pengukuran Kinerja Tahun 2020

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Target TA 2020 (%)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Meningkatnya pembenahan kapasitas pemerintah yang prima	Meningkatnya pelayanan Administrasi perkantoran	70	385.045.800	99,07
		Meningkatnya kinerja aparatur	80	25.670.000	100
		Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian keuangan	100	5.000.000	100
2	Meningkatnya produksi nilai tambah dan pemasaran hasil pertanian, perikanan, perkebunan dan kehutanan.	Meningkatnya kesejahteraan petani	70	63.647.500	99,92
		Meningkatnya luas tanam dan luas panen	70	261.171.000	99,95
3	Meningkatnya diversifikasi pangan masyarakat.	Capaian penganeka ragaman konsumsi pangan	70	48.625.000	99,90
		Cakupan Berkurangnya daerah rawan pangan	70	40.694.700	99,88

2.2. Analisis Kinerja OPD

Secara Umum, pelaksanaan program dan kegiatan yang direncanakan telah dapat dilaksanakan, demikian juga sasaran yang ditetapkan telah tercapai dengan hasil cukup baik, capaian kinerja yang relatif tinggi menunjukkan telah terlaksananya kegiatan dengan baik dan sesuai dengan yang direncanakan/ditargetkan.

Keberhasilan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Seram Bagian Barat dalam menjalankan Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat diukur berdasarkan pencapaian outcome. Pengukuran tersebut dilakukan mengingat outcome merupakan hasil dari berfungsinya output yang telah dilaksanakan bidang yaitu Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan, serta Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan. Pengukuran capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan tersebut dilaksanakan secara tahunan, sedangkan pengukuran realisasi keuangan dan fisik output kegiatan dipantau secara bulanan dan triwulanan melalui Laporan realisasi kinerja dan realisasi keuangan.

2.3. Rencana Kinerja Tahun 2021

Kajian strategi dan arah kebijakan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Seram Bagian Barat merupakan penjabaran dari misi yakni; **Misi 5** RPJMD Kabupaten Seram Bagian Barat periode 2017-2022. Ekspektasi perencanaan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Seram Bagian Barat pada masing-masing misi bertumpuh pada strategi dan kebijakan yang selanjutnya dijabarkan lebih mendetail kedalam program dan kegiatan.

Secara umum pembangunan ketahanan pangan tahun 2021 mempunyai program utama yaitu Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat. Program tersebut diwujudkan melalui berbagai tahapan dari koordinasi dan sinkronisasi dalam perencanaan program,elibatan partisipasi pemangku kepentingan dan masyarakat, identifikasi dan intervensi data pangan dan gizi, serta pengembangan model kebijakan guna pencapaian sasaran pemantapan ketahanan pangan masyarakat sampai tingkat perseorangan.

Adapun arah kebijakan, strategis dan langkah operasional yang akan dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Seram Bagian Barat pada tahun anggaran 2021 sebagaimana tertuang dalam Renstra adalah sbb:

A. Program dan Kegiatan

1. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
 - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
 - Penyediaan jasa administrasi keuangan;
 - Penyediaan alat tulis kantor;
 - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
 - Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;
 - Penyediaan Jasa Administrasi Teknis dan Sopir;
 - Rapat - Rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah;
 - Rapat - Rapat Koordinasi dan konsultasi dalam daerah;
2. PROGRAM PENINGKATAN SARANA & PRASARANA APARATUR
 - Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
 - Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
3. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN SKPD.
 - Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (LKIP);
4. PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI
 - Kegiatan Pendampingan, Peningkatan kesejahteraan Petani Kecil (PKPK)/SOLID.
5. PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN
 - Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan, Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL);
 - Pemantauan dan Analisis Harga Pangan Pokok;
 - Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat;
6. PROGRAM PENGEMBANGAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN DAN PENINGKATAN KEAMANAN PANGAN.
 - Pemantauan, Pengawasan dan Pengendalian Mutu Keamanan Pangan Segar
7. PROGRAM PENANGAN DAERAH RAWAN PANGAN
 - Penyusunan Peta Ketahanan Pangan dan Kerentanan Pangan (FSVA);
 - Analisa dan Pemantauan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG).

B. MATRIK RENCANAN KINERJA TAHUNAN 2017

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Seram Bagian Barat mempunyai matrik rencana kinerja tahunan sesuai dengan sasaran Rencana Strategis (RENSTRA 2017-2022), adalah sebagai berikut, yakni :

Tabel. 2. 1. Rencana Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2021

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target (%)
(1)	(3)	(4)	(6)
1	Meningkatnya pembenahan kapasitas pemerintah yang prima	Meningkatnya pelayanan Adm perkantoran Meningkatnya kinerja aparatur Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian keuangan	72 80 100
2	Meningkatnya produksi nilai tambah dan pemasaran hasil pertanian, perikanan, perkebunan dan kehutanan.	Meningkatnya kesejahteraan petani Meningkatnya luas tanam dan luas panen	80 80
	Meningkatnya diversifikasi pangan masyarakat.	Capaian panganeka ragam konsumsi pangan Cakupan Berkurangnya daerah rawan pangan	80 30

BAB II

PENUTUP

Rencana Kinerja Tahunan Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2021 disusun sebagai bentuk komitmen DISHANPAN Kabupaten Seram Bagian Barat dalam menerapkan sistem akuntabilitas kinerja dilingkungan instansi Pemerintah. Dokumen ini merupakan salah satu dokumen perencanaan yang merupakan komponen dari siklus akuntabilitas kinerja.

Rencana Kinerja ini merupakan rencana tahunan sebagai turunan dari Renstra DISHANPAN 2017-2022 yang berjangka waktu lima tahun. Rencana kinerja memberikan gambaran lebih detail mengenai sasaran dan strategi pencapaiannya. Dokumen ini memuat kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran untuk mencapai indikator program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator-indikator kinerja yang dituangkan dalam dokumen ini diharapkan dalam pelaksanaannya dapat diukur capaian kerjanya.

Dengan demikian, semoga pelaksanaan kegiatan sebagaimana disusun dalam Rencana Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Tahun Anggaran 2021 dapat dijadikan acuan dan pedoman pelaksanaan kegiatan ketahanan pangan tahun 2021 dan memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Piru, Januari 2021

Dinas Ketahanan Pangan
Kabupaten Seram Bagian Barat

KEPALA DINAS

SAMMY LOUPATTY, SE
NIP. 19640912 199402 1 001

**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN
DINAS KETAHANAN PANGAN TAHUN ANGGARAN 2021**

KODE						PROGRAM/KEGIATAN/ SUB-KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		LOKASI	ALOKASI ANGGARAN BELANJA (Rp)	SUMBER DANA
							HASIL PROGRAM/ KELUARAN KEGIATAN/KELUARAN SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN			
1						2	3	4	5	6	7
01	0	00				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Jumlah pelayanan administrasi perkantoran, Kinerja, Disiplin dan Kapasitas sumber daya Aparatur serta pengembangan sistem pelaporan capaian keuangan.	100%			
X	XX	01	2	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Kinerja SKPD	100%			
X	XX	01	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Instansi Pemerintah (LAKIP)	1 Dokumen	DKP (Piru)	14.507.900	APBD
X	XX	01	2	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Ketahanan Pangan	1 (Satu) Paket	DKP (Piru)	75.000.000	APBD
X	XX	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					
X	XX	01	2	02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Tenaga Pengelola Keuangan	12 Bulan	DKP (Piru)	66.550.000	APBD
X	XX	01	2	02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	DKP (Piru)	13.975.500	APBD
X	XX	01	2	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Kepegawaian				
X	XX	01	2	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Kerja Lapangan	40 Stel	DKP	165.061.303	APBD
X	XX	01	2	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Khusus	40 Stel	DKP	39.300.000	APBD
X	XX	01	2	05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Pelatihan Teknis	8 Orang	DKP	124.500.000	APBD

X	XX	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					
X	XX	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan Perkantoran	1 Paket	DKP	150.000.000	APBD
X	XX	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah ATK selama 12 Bulan	12 Jenis/ 12 Bln	DKP	13.310.000	APBD
X	XX	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	1 Paket	DKP	6.655.000	APBD
X	XX	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah RaKor dan Konsul Dalam daerah	30 OH	DKP	199.650.000	APBD
X	XX	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah RaKor dan Konsul luar daerah	10 OH	DKP	145.000.000	APBD
X	XX	01	2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan PEMDA	100%			
X	XX	01	2	07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendis Operasional/lapangan	5 Unit	DKP	100.000.000	APBD
X	XX	01	2	07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Meubel	1 Paket	DKP	125.650.000	APBD
X	XX	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					
X	XX	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai Selama 12 Bulan	2 Jenis/ Paket	DKP	5.490.375	APBD
X	XX	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Listrik 12 bulan	12 Bulan	DKP	1.597.200	APBD
X	XX	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pegawai Honor dan Sopir	1 Paket/ 12 Bulan	DKP	228.000.000	APBD
X	XX	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
X	XX	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendis yang dipelihara	1 Unit	DKP	41.793.400	APBD
X	XX	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Komputer/Laptop	14 Unit	DKP	12.303.000	APBD

X	XX	01	2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	1 Paket	DKP	33.275.000	APBD
2	09	02				PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Peningkatan Ekonomi Rumah Tangga Petani	80%			APBD
2	09	02	2	01	00	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten	Peningkatan Akses Distribusi Pangan Masyarakat				APBD
2	09	02	2	01	01	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan Masyarakat	Berkembangnya Cadangan Pangan Daerah	4 Desa	Kab. SBB	55.000.000	APBD
2	09	02	2	01	03	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Meningkatnya kinerja kelompok tani mandiri yang terbina	22 Desa	Kab. SBB	105.000.000	APBD
2	09	02	2	01	05	Penyusunan Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	Tersusunnya Road Map Alur Distribusi Pendukung Kemandirian Pangan	1 (Satu) Paket	Kab. SBB	66.550.000	APBD
2	09	03	2	01		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Peningkatan Luas Tanam dan Luas Panen	80%			APBD
2	09	03	2	01	00	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Penguatan Data Informasi Rantai Pasokan Pemasaran Pangan				APBD
2	09	03	2	01	01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Tersusunnya Neraca Bahan Makanan (NBM/PPH) Kabupaten	1 Paket/ Tahun	11 (Sebelas) Kecamatan	59.895.000	APBD
2	09	03	2	01	02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Terlaksananya Pemanfaat Pekarangan untuk Pengembangan Pangan	8 (Delapan) Kelompok	11 (Sebelas) Kecamatan	33.275.000	APBD
2	09	03	2	01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Tersedianya data dan informasi kondisi ketahanan pangan daerah	1 (Satu) Dokumen	Kab. SBB	34.273.250	APBD
2	09	03	2	01	04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah Data Analisis Harga Pangan Pokok	1 (Satu) Paket	Kab. SBB	59.895.000	APBD
2	09	03	2	01	05	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Jumlah Usaha Produktif Berbasis Sumber Daya Lokal yang dimiliki Kelompok Tani dan perorangan	1 (Satu) Paket	Kab. SBB	6.550.000	APBD

2	09	03	2	02	00	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten	Meningkatkan Keseimbangan Cadangan Pangan Sistem Manajemen Ketahanan Pangan Daerah				APBD
2	09	03	2	02	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten	Jumlah Pertemuan Regional Dewan Ketahanan Pangan Daerah (1 Kegiatan) dan Jumlah Keikutsertaan Daerah dalam Pameran Hari Pangan Sedunia	2 Kegiatan	Piru dan Luar Daerah	140.750.000	APBD APBD
2	09	03	2	02	02	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Tersusunnya Dokumen Profil Ketahanan Pangan Kabupaten	1 (Satu) Dokumen	DKP (Piru)	35.000.000	APBD
2	09	03	2	03	00	Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi	Tersedianya Akses Pangan Masyarakat				
2	09	03	2	03	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	Tersedianya Data dan Informasi Rantai Pasokan dan produksi Komoditi pangan serta Pemenuhan Konsumsi Pangan Segar Menjelang Hari-hari Besar Keagamaan Nasional	2 (Dua) Paket	11 (Sebelas) Kecamatan	188.850.000	APBD
2	09	03	2	04	00	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/ Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Peningkatan Kenaikan Pola Pangan Harapan (PPH), Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA)				
2	09	03	2	04	01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Jumlah Dokumen Analisis Pola Pangan Harapan (PPH-Konsumsi) berdasarkan Rekomendasi Angka Kecukupan Gizi	1 (Satu) Dokumen	Kab. SBB	39.930.000	APBD
2	09	03	2	04	02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Anekaragam Menu Baru Berbahan Pangan Loka	1 (Satu) Paket	Kab. SBB dan Luar Daerah	72.872.250	APBD
2	09	03	2	04	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Tersedianya Dokumen Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) Kabupaten	1 (Satu) Paket	Kab. SBB	199.650.000	APBD
2	09	04				PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Cakupan Daerah Rawan Pangan	80%			
2	09	04	2	01	00	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Tersedianya dokumen peta FSVA Kab. SBB				

2	09	04	2	01	01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Terlaksananya Penyusunan Peta FSVA Kabupaten	1 (Satu) Dokumen	Kab. SBB	125.000.000	
2	09	04	2	02	00	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya penanganan kasus pada daerah rawan pangan				
2	09	04	2	02	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten	Jumlah Penanganan Kasus pada Daerah Rawan Pangan Daerah	1 (Satu)Paket	Kab. SBB	266.200.000	APBD
2	09	04	2	02	02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kuantitas Penyaluran Beras Cadangan Pangan	1 Paket	Kab. SBB	66.550.000	APBD
2	09	05	2	01	02	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Peningkatan Keamanan Pangan dan Penganekaragaman Konsumsi Pangan	80%			
2	09	05	2	01	00	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Capaian penganekaragaman konsumsi pangan				
2	09	05	2	01	02	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan daerah Kabupaten	Jumlah Jaminan Keamanan Pangan bagi masyarakat khususnya Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang sehat dan Berkualitas	1 (Satu) Paket	Kab. SBB	112.000.000	APBD
2	09	05	2	01	04	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten	Jumlah sosialisasi dan Promosi Penganeka-ragaman Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan di 6 (Enam) Desa	6 (Enam) Desa	Kab. SBB	113.100.000	APBD
2	09	05	2	01	05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten	Jumlah Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) Daerah Kabupaten	11 (Sebelas) Kecamatan	Kab. SBB	81.500.000	APBD
JUMLAH										3.483.459.178	

Piru, Januari 2021

Dinas Ketahanan Pangan

KEPALA DINAS

SAMMY LOUPATTY, SE

